LAMPIRAN IX
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 27 JUNI 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA
DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/12/PADG/2019
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA
DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK
INDONESIA

A. TATA CARA PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT DI PENYELENGGARA

1. Tata Cara Penanganan Keadaan Tidak Normal

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan SKNBI maka penanganan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai Keadaan Tidak Normal dan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:
  - 1) menghentikan sementara kegiatan pengiriman DKE dan kegiatan lainnya yang terhubung ke SSK;
  - 2) dalam hal SSK dapat berfungsi kembali, Peserta melakukan:
    - a) koneksi ulang ke SSK;
    - b) rekonsiliasi antara status *batch* DKE pada SPK dengan status *batch* DKE pada SSK; dan/atau
    - c) pengiriman ulang dalam hal terdapat *batch* DKE yang belum berhasil dikirim;
- b. dalam hal Keadaan Tidak Normal mengakibatkan SKNBI tidak dapat beroperasi sampai dengan batas waktu tertentu, Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanggulangan antara lain:
  - 1) perubahan waktu operasional SKNBI;
  - 2) mengalihkan perhitungan transfer dana melalui SKNBI ke Sistem BI-RTGS;
  - 3) penghentian sementara sebagian atau seluruh layanan dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
- c. pelaksanaan kegiatan penanganan Keadaan Tidak Normal dilakukan oleh Peserta berdasarkan pemberitahuan dari Penyelenggara melalui *administrative message*, *helpdesk* SKNBI, dan/atau sarana lainnya.

2. Tata Cara Penanganan Keadaan Darurat

Dalam hal terjadi Keadaan Darurat di Penyelenggara yang menyebabkan SKNBI tidak dapat beroperasi maka penanganan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanggulangan Keadaan Darurat dan memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai Keadaan Darurat serta hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta; dan
- b. kebijakan penanganan Keadaan Darurat antara lain sebagai berikut:
  - 1) perubahan waktu operasional SKNBI;
  - 2) mengalihkan perhitungan transfer dana melalui SKNBI ke Sistem BI-RTGS; dan
  - 3) penghentian sementara sebagian atau seluruh layanan dalam penyelenggaraan SKNBI.

B. KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT DI PESERTA

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta yang menyebabkan terganggunya kelancaran operasional SKNBI maka penanganan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Peserta harus memberitahukan kepada Penyelenggara mengenai terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
2. pemberitahuan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat disampaikan kepada:
  - a. *helpdesk* SKNBI melalui sarana telepon paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat; dan
  - b. Penyelenggara melalui surat yang didahului dengan faksimili atau sarana lainnya dalam hal memerlukan tindak lanjut perpanjangan periode waktu kegiatan pengiriman DKE sesuai dengan prosedur permohonan perubahan waktu operasional;
3. dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat melakukan kegiatan operasional SKNBI di lokasi Peserta maka Peserta dapat menggunakan Fasilitas Kontingensi, yang terdiri atas:
  - a. fasilitas *guest bank*; dan
  - b. fasilitas unggah (*upload*) DKE; dan
4. dalam hal Peserta memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan operasional SKNBI maka Peserta harus segera memberitahukan kepada Penyelenggara melalui surat yang dapat didahului dengan faksimili atau sarana lain.

C. TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS KONTINGENSI

Pengajuan permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Peserta mengajukan surat permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi kepada Penyelenggara paling kurang memuat:
  - a. alasan untuk menggunakan Fasilitas Kontingensi;
  - b. lokasi penggunaan Fasilitas Kontingensi; dan
  - c. pernyataan bahwa Peserta yang bersangkutan membebaskan Penyelenggara atau KPwDN dari tanggung jawab atas segala kerugian yang akan timbul (*indemnity*) pada Peserta terkait dengan penggunaan Fasilitas Kontingensi;
2. surat permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Penyelenggara melalui faksimili atau sarana lainnya;
3. untuk Peserta yang berada di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang menyediakan Fasilitas Kontingensi, dengan memperhatikan jam kerja KPwDN;
4. dalam hal permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi disetujui, maka:
  - a. Peserta harus membawa *soft token* terkini dalam rangka penggunaan Fasilitas Kontingensi;
  - b. Peserta harus menyiapkan data transaksi dan hal lain yang diperlukan dalam rangka penggunaan Fasilitas Kontingensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK; dan
  - c. dalam hal jumlah Peserta yang mengajukan permohonan melebihi kapasitas Fasilitas Kontingensi yang disediakan, Penyelenggara

- dapat menetapkan batas maksimal waktu dan/atau urutan penggunaan Fasilitas Kontingensi berdasarkan urutan kedatangan Peserta; dan
5. dalam hal Penyelenggara menetapkan Fasilitas Kontingensi yang dapat digunakan oleh Peserta adalah fasilitas unggah (*upload*) DKE maka:
    - a. data transaksi disampaikan kepada Penyelenggara disertai dengan bukti pengiriman DKE *offline* sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
    - b. penyampaian data transaksi dan bukti pengiriman DKE *offline* kepada Penyelenggara atau KPwDN harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau petugas Peserta yang diberi kuasa oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen di Penyelenggara.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA